

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Adi Sulistiyono dan Isharyanto. 2018. *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Depok: Prenadamedia Group.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bagir Manan. 2003. *Teori dan Politik konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Burhan Bungin. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Hasbie As-Shiddieqie. 1970. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hendry P Panggabean. 2001. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- [I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.](#)
- Komisi Yudisial RI. 2013. *Risalah Komisi Yudisial, Cikal Bakal, Kelembagaan, dan Dinamika Wewenang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI.
- [M Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.](#)
- M Yahya Harahap. 2008. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kembali dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh. Mahfud MD. 2009. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.](#)
- Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penengakan Hukum*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Sudaryono. 2017. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2009. *Motode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Usep Ranawijaya. 1983. *Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-dasarnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wantjik Saleh. 1977. *Kehakiman dan Peradilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Zainal Arifin Mochtar. 2016. *Lembaga Negara Independen; Dinamika perkembangan Urgensi Penataannya kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 73.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4415.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor, 157.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor, 106.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. Putusan Hakim

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Jurnal

Dedi Alnando. *“Politik Hukum Pengisian Jabatan Hakim Agung Melalui Jalur Hakim Non Karier Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”*. Jurnal Ilmu Hukum No. 1, Volume 7, Agustus 2017- Januari 2018. Riau: Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Riau.

Fahmi H Bachmid, Ahmad Yulianto Ihsan. *“Pola dan Mekanisme Pengisian Jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia menunt Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan UUD 1945”*. Jurnal Unpak PALAR (Pakuan Law Review) No. 01, Volume 08, Januari-Juni 2022. Fakultas Hukum. Surabaya: Universitas Narotama Surabaya.

Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. *“Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”*. Jurnal Gema Keadilan Volume 7, Edisi I, Juni 2020.

Kusnu Goesniadhie S. *Prinsip Pengawasan Independensi Hakim*, Jurnal Hukum No. 3, Volume 14, Juli 2007. Malang: Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana.

Mei Sutanto, *Revitalisasi Peran Publik Dalam Pengangkatan Calon Hakim Agung*, Jurnal Peradilan Indonesia. Volume 6, Juli-Desember 2017. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Nur Agus Susanto. "*Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Efektifitas Sanksi Untuk Kasus Hakim Penerima Suap*". Jurnal Yudisial No. 1, Volume 4, 2011.

Ridham Priskap. "*Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*". Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi No. 20, Volume 1, Februari 2020. Dosen Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi. Jambi: Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi.

Susi Dwi Harijanti. "*Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri*". Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 4, Volume 21, Oktober 2014. Fakultas Hukum. Bandung: Universitas Padjadjaran.



E. Internet

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt518228f47a2e9/perbedaan-mahkamah-agung- dengan-mahkamah-konstitusi/>

<https://www.pta-semarang.go.id/artikel-pengadilan/200-urgensi-independensi-hakim-dan-pengawasan-masyarakat-dalam-perspektif-penegakan-hukum-dan-keadilan>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online